

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Jl. PANGERAN SANTRI NO. 111 SUMEDANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja - SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
39. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumedang;

40. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
41. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
42. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor ...).
43. Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
44. Peraturan Bupati nomor tahun 2022 tentang uraian jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
45. Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumem Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program

dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan

- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik selama lima tahun. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2023, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 Pelaksanaan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada lampiran I .

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2022 sebesar 100%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat						
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata					100%	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang

2.1.1.a

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 sebesar 100%, dan Target kinerja tercapai sebagaimana mestinya. Adapun penjelasan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

a. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun 2022 tetap sama yaitu 100%, dan Capaian Kinerja tercapai dan teralisasi.

Tabel 3.1.1.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap sama

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" 100%, dan realisasi dari target 100% tercapai di Tahun 2022.

Tabel 3.1.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Konisi Kondusif
Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang tidak merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang dengan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.1.d
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Konidis Kondusif
Provinsi/Nasional Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022			Ket.
			Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	-	100	100	-	100	100	

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama *Tingkat Cipta Kondisi Kondusif* (*Jumlah potensi konflik yang tertangani /Jumlah potensi konflik*)x100%, adapun Keberhasilan, kegagalan dan Solusi/Tindak lanjut dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU “Tingkat Cipta Kondisi Kondusif” tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang. Rakor Forkopimda yang dilaksanakan tiga kali setiap bulannya menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat menguatkan kebijakan daerah yang didukung oleh seluruh unsur Forkopimda. Berbagai hasil keputusan rakor Forkopimda menjadi rujukan kebijakan daerah yang diimplementasikan oleh seluruh SKPD dan Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sumedang. Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang melibatkan unsur FORKOPIMDA dan stakeholder yang terkait dalam penanganan dan pencegahan masalah yang timbul di Kabupaten Sumedang dengan outcome menciptakan Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang dengan menghasilkan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI,

KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang

4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM, 6 potensi konflik EKONOMI, 2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi konflik SOSIAL);
- 14 potensi konflik yang berbentuk audiensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang.

Sebagai bentuk keberhasilan dari aktivitas sub kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah yaitu adanya kondisi daerah kabupaten sumedang yang kondusif sehingga pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar. Dampak dari keberhasilan pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten sumedang meraih berbagai macam penghargaan baik pusat maupun provinsi yang merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sumedang. Ada 122 penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten sumedang, hal ini berdampak terhadap besarnya dana insentif daerah yang diterima oleh pemkab sumedang untuk membiayai pembangunan di wilayah kabupaten sumedang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh kasus keberhasilan adanya aktivitas sub kegiatan kewaspadaan dini daerah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 terjadi unjuk rasa warga kecamatan Surian yang menuntut penolakan kehadiran Presiden Joko Widodo di Surian untuk meresmikan proyek Bendungan Sadawarna. Pemerintah kabupaten sumedang melalui Bakesbangpol dengan sigap merespon aksi unjuk rasa tersebut dengan memberi alternative solusi agar masyarakat Surian tidak menolak kehadiran Presiden Joko Widodo. Pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 Bupati Sumedang menugaskan Kepala Bakesbangpol dan unsur terkait untuk menyelesaikan permasalahan di kecamatan Surian agar susansa menjadi kondusif. Pada hari itu Kepala Bakesbangpol Bersama Dinas PUTR mengerahkan alat berat untuk membuat jalan alternative Cimuncang-Nanjungwangi sebagai bentuk respon terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya jalur alternative disamping jalan utama yang akan dibangun pihak Bendungan Sadawarna. Berkat kesigapan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dapat menggalang warga masyarakat yang awalnya mengadakan pengajian untuk menolak Presiden Joko Widodo pada Senin malam tanggal 26 Desember tahun 2022, masyarakat menyelenggarakan Istigosah Bersama berdoa untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Bendungan Sadawarna. Pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 Presiden Joko Widodo dating ke Surian untuk meresmikan proyek Bendungan Sadawarana. Pada saat itulah Bupati Sumedang menyampaikan keberhasilan Pemkab Sumedang dalam program Kemiskinan dan Pencegahan Stunting melalui Platform Digital aplikasi SIMPATI, Presiden Joko Widodo merasa tertarik dan mengundang Bupati Sumedang untuk mempersentasikan aplikasi SIMPATI tersebut di Istana Negara. Pada tanggal 2 Januari tahun 2023 dihadapan Menteri Sekretaris Kabinet dan para Menteri Koordinator Bupati Sumeang mempersantisakn platform digital tentang aplikasi SIMPATI terkait Pencegahan Stunting dan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Bupati Sumedang diundang menjadi pembicara pada kegiatan Rakornas pengendalian inflasi daerah di Sentul Bogor untuk menyampaikan Program Penanganan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting dihadapan para Menteri, Kabinet kerja, para Panglima Kodam, para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Inodnesia. Tindak lanjut dari kegiatan di Sentul tersebut Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada 50 Bupati/Walikota yang memiliki angka stunting tertinggi untuk melakukan studi tiru ke Kabupaten Sumedang. Semenjak adanya perintah Presiden tersebut, sampai saat ini sudah ada 161 Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang untuk belajar aplikasi SIMPATI terkait program penanganan

kemiskinan dan pencegahan stunting. Dan ada 20 Kab/Kota yang sudah melakukan kerjasama tentang aplikasi SIMPATI terkait program penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting.

Semua keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya aktivitas sub kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Rakor Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan kontribusi terhadap kondisi kondusivitas daerah sehingga pemerintah kabupaten sumedang dapat melaksanakan semua program kebijakan dengan tertib, aman dan lancar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertikal (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.
7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri

dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM, 6 potensi konflik EKONOMI, 2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi konflik SOSIAL);
- 14 potensi konflik yang berbentuk audiensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor Penanganan KONflik Sosial sebagai pencegahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang.

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan program pembangunan di kabupaten sumedang.

9. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud memiliki kemajuan Intelijen sehingga Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat bias menghasilkan jaringan yang bias berbagi informasi akurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang terhadap deteksi dini kerawanan-kerawanan bias teratasi di kabupaten sumedang.

10. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan melaksanakan Kemah secara terbuka di alam bebas dalam rangka meningkatkan kualitas dan solidaritas dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan agama di Kabupaten Sumedang.

11. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda pemudi Indonesia dan seluruh rakyat nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah.
- Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia.
- Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu.
- Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia.

12. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud membangun karakter muda yang lebih memahami nilai-nilai luhur pancasila.

13. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Gugus tugas daerah di kabupaten sumedang;
- membangun karakter Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Sumedang sebagai upaya membangun dan mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah;

14. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Pelajar dan kaum muda berjiwa NKRI yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju tanpa melupakan kebudayaan bangsa sendiri.

15. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan kegiatan kemah secara terbuka di alam bebas, guna meningkatkan kerjasama yang baik antar ormas dengan pemerintah serta memantapkan kesadaran kehidupan bernegara Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.

16. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Natal tahun 2022 dan Tahun Baru

2023 bekerjasama dengan unsur instansi vertical (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang

- Kegagalan/Kendala :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut;

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan tempat secretariat dan pergantian pengurus, serta secretariat ormas tidak memiliki atau memasang plang secretariat di alamat masing-masing.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan secara optimal.

4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :

Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melalui Kasi Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.

5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.

6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan dokumen adminstrasinya belum lengkap;
- Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.

7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi vertical dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi, sehingga belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA
9. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Radikalisme yang menjadi kaum tertentu dan kemajemukan agama, etnis, suku dan identitas yang berbeda dalam kemajemukan menjadi penyebab terjadinya konflik antar anak bangsa.
10. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan agama di Kabupaten Sumedang
11. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Pengaruh negative dan modernisasi perkembangan teknologi informasi bagi generasi muda yang salah terkait penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, tawuran antar pelajar dan kasus lainnya.
12. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas kegiatan
13. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Masih adanya Terorisme, bahaya penyalahgunaan narkoba dan permasalahan angka gizi buruk, stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sumedang.
14. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda masih terpusat pada Pendidikan formal
15. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan

16. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.

- Solusi/Tindak Lanjut :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO)) dilaksanakan survey ke lapangan untuk mengecek terlebih dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaannya.

1. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :

Pelaporan data informasi terkait di setiap kecamatan akan dilaporkan melalui aplikasi SIDA KOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.

1. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan adanya cara bertindak dari aparat kepolisian yang mengatur rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.

2. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan instansi vertikal dan instansi terkait;

- Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa penerjemah Bahasa(translate)
3. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan yang tergabung di Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang, guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten Sumedang
 4. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.
 5. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Menguatkan nilai-nilai bhineka tunggal ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 6. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.
 7. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Dengan diadakannya refleksi nilai-nilai sumpah pemuda dan peringatan hari-hari pahlawan
 8. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya
 9. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Ditingkatkan kembali guna penguatan GNRM di Lingkungan SKPD dan kecamatan dengan Narasumber TNI, POLRI, Bakesbangpol dan instansi terkait lainnya
 10. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Perlu penguatan nilai-nilai ideologi pancasila bagi generasi muda melalui Bimtek Wawasan kebangsaan dengan Narasumber TNI, POLRI, BNNK dan Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

11. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
- Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya;
 - Dilaksanakan kembali kegiatan Jambore Ormas guna berkesinambungan setiap tahun dimaksudkan agar setiap ormas dapat secara bergiliran menjadi peserta dari kegiatan jambore ormas.
12. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Perlu kiranyaantisipasi adanya perubahan kepadatan arus lalu-lintas melalui wilayah kabupaten sumedang seiring ditetapkannya wilayah Sumedang sebagai jalur alternative prioritas.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun 2022 sebesar Rp. 4,824,795,000,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4,810,642,439.00 atau 99,50%.

Tabel 3.1.1.d
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi (DPPA Tahun 2022)

Program	Anggaran	Realisasi	Satuan %
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	310.000.000	308.089.650,00	99,38
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	500.000.000	499.743.950,00	99,95
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	350.000.000	348.500.000,00	99,57
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.664.795.000	3.654.308.830,00	99,08
Jumlah Total	4.824.795.000	4.810.642.430,00	99,50

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun 2022 adalah **99,50%**.

Tabel 3.1.1.e
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	0%	Sangat Efisien

nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat					
--	--	--	--	--	--

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif, adapun Keberhasilan, kegagalan dan Solusi/Tindak lanjut dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

17. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke

Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.

18. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang,. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM, 6 potensi konflik EKONOMI, 2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi konflik SOSIAL);
- 14 potensi konflik yang berbentuk audiensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang melibatkan Tim FORKOPIMDA dan stakeholder yang terkait dalam penanganan dan pencegahan masalah yang timbul di Kabupaten Sumedang dengan outcome menciptakan Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang dengan menghasilkan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang

2. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang

berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM, 6 potensi konflik EKONOMI, 2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi konflik SOSIAL);
- 14 potensi konflik yang berbentuk audiensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di

kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang

3. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertikal (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang.
4. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.
5. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM, 6 potensi konflik EKONOMI, 2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi konflik SOSIAL);
 - 14 potensi konflik yang berbentuk audiensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI) Sehingga perlunya rakor Penanganan KONflik Sosial sebagai pencegahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejala terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang.
6. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan program pembangunan di kabupaten sumedang.
 7. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud memiliki kemajuan Intelijen sehingga Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat bisamenghasilkan jaringan yang bias berbagi informasi akurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang terhadap deteksi dini kerawanan-kerawanan bias teratasi di kabupaten sumedang.
 8. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan melaksanakan Kemah secara terbuka di alam bebas dalam rangka meningkatkan kualitas dan solidaritas dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan agama di Kabupaten Sumedang.
 9. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :
 - Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda pemudi Indonesia dan seluruh rakyat nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah.

- Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia.
- Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu.
- Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia.

10. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud membangun karakter muda yang lebih memahami nilai-nilai luhur pancasila.

11. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Gugus tugas daerah di kabupaten sumedang;
- membangun karakter Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Sumedang sebagai upaya membangun dan mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah;

12. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Pelajar dan kaum muda berjiwa NKRI yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju tanpa melupakan kebudayaan bangsa sendiri.

13. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan kegiatan kemah secara terbuka di alam bebas, guna meningkatkan kerjasama yang baik antar ormas dengan pemerintah serta memantapkan kesadaran kehidupan bernegara Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.

14. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bekerjasama dengan unsur instansi vertikal (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang

aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang

b. Kegagalan/Kendala :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut;
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan tempat secretariat dan pergantian pengurus, serta secretariat ormas tidak memiliki atau memasang plang secretariat di alamat masing-masing.
3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan secara optimal.
4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melalui Kasi Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.
5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan dokumen administrasinya belum lengkap;
 - Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.
7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi vertical dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi, sehingga belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA
9. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Radikalisme yang menjadi kaum tertentu dan kemajemukan agama, etnis, suku dan identitas yang berbeda dalam kemajemukan menjadi penyebab terjadinya konflik antar anak bangsa.
10. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan agama di Kabupaten Sumedang
11. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Pengaruh negative dan modernisasi perkembangan teknologi informasi bagi generasi muda yang salah terkait penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, tawuran antar pelajar dan kasus lainnya.
12. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas kegiatan
13. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Masih adanya Terorisme, bahaya penyalahgunaan narkoba dan permasalahan angka gizi buruk, stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sumedang.
14. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda masih terpusat pada Pendidikan formal
15. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan

16. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.

• Solusi/Tindak Lanjut :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapangan untuk mengecek terlebih dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaannya.

2. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :

Pelaporan data informasi terkait di setiap kecamatan akan dilaporkan melalui aplikasi SIDAOKOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.

3. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan adanya cara bertindak dari aparat kepolisian yang mengatur rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.

4. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan instansi vertikal dan instansi terkait;

- Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa penerjemah Bahasa(translate)
5. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertikal terkait permasalahan yang tergabung di Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang, guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten Sumedang
 6. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.
 7. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Menguatkan nilai-nilai bhineka tunggal ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 8. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.
 9. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Dengan diadakannya refleksi nilai-nilai sumpah pemuda dan peringatan hari-hari pahlawan
 10. Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya
 11. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Ditingkatkan kembali guna penguatan GNRM di Lingkungan SKPD dan kecamatan dengan Narasumber TNI, POLRI, Bakesbangpol dan instansi terkait lainnya
 12. Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Perlu penguatan nilai-nilai ideologi pancasila bagi generasi muda melalui Bimtek Wawasan kebangsaan dengan Narasumber TNI, POLRI, BNNK dan Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

13. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

- Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya;
- Dilaksanakan kembali kegiatan Jambore Ormas guna berkesinambungan setiap tahun dimaksudkan agar setiap ormas dapat secara bergiliran menjadi peserta dari kegiatan jambore ormas.

14. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Perlu kiranya antisipasi adanya perubahan kepadatan arus lalu-lintas melalui wilayah kabupaten sumedang seiring ditetapkannya wilayah Sumedang sebagai jalur alternative prioritas.

3.1.2 Tingkat Bina Demokratisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Tingkat Bina Demokratisasi” tahun 2022 sebesar 100%, dan realisasi kinerja tercapai tas target yang sudah ditentukan. Seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 yaitu 100%, dan Capaian Kinerja tercapai dan teralisasi.

Tabel 3.1.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan	Tingkat Bina Demokratisasi	persen	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai

berdemokrasi									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Bina Demokratisasi 100%, dan realisasi sebesar 100% tercapai di Tahun 2022.

Tabel 3.1.2.c

Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun akhir
Tingkat Bina Demokratisasi	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Bina Demokratisasi di Kabupaten Sumedang tidak merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Bina Demokratisasi di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan Partai Politik sehingga menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan

Tabel 3.1.d

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi Provinsi/Nasional Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022			Ket.
			Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	-	-	-	-	100	100	

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Demokratisasi, adapun Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Bina Demokratisasi" ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :

- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :

- Beberapa kantor sekretariat yang ada di kecamatan belum memiliki/terpasang plang nama sekretariat;
- Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau menyewa/mengontrak bangunan orang lain;
- Kelengkapan sekretariat mebeuler, sarana computer dan lain sebagainya belum lengkap

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pemriksaan kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
 - Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat pelaporan
- c. Solusi/Tindak Lanjut :
1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang (Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang baik di Kabupaten Sumedang
 2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai yang benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan bantuan keuangan parpol;
 - Kepala Badan Kesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bantuan keuangan parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 sebesar Rp. **1,242,451,000.00** yang terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Sedangkan realisasi sebesar Rp. **1,241,794,662 .00** atau 99,97%.

Tabel 3.1.2.d
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi (DPPA tahun 2022)

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	1.242.451.000	1.241.794.662	99,97

SERTA BUDAYA POLITIK			
Jumlah Total	1,242,451,000.00	1,241,794,662 .00	99,97

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 sebesar 99,97% capaian kinerja 100%. Dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.e
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	100%	100%	0%	Sangat Efisien

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi, adapun Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU “Tingkat Bina Demokratisasi” ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan

outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :

- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;

- Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Beberapa kantor sekretariat yang ada di kecamatan belum memiliki/terpasang plang nama sekretariat;
 - Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau menyewa/mengontrak bangunan orang lain;
 - Kelengkapan sekretariat mebeuler, sarana computer dan lain sebagainya belum lengkap
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pemeriksa kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
 - Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat pelaporan

c. Solusi/Tindak Lanjut :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang (Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang baik di Kabupaten Sumedang
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai yang benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan bantuan keuangan parpol;

- Kepala Bakesbangpol membuat ancaman kepada pengurus partai guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bankeu parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

TABEL 2.1.a
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		2.368.339.970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.228.900.484	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan	13 Dokumen	26.485.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan	13 dokumen	52.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.785.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	19.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	4.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	25.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perubahan DPA - SKPD	1 dokumen	3.800.000						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	4.500.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	1.737.454.970	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	34 laporan	1.726.681.484	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	1.715.454.970	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.696.681.484	
8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	8.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Administrasi	12 dok	13.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	11 dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100%	3.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	66 orang	7.219.000	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33 orang	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	32 orang	3.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	33 orang	7.219.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100%	464.830.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	12 Kali	533.000.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	15 Jenis	4.999.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	76.000.000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	115.190.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	7.000.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	6.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 kali	100.000.000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 kali	125.760.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	40.000.000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	43.249.100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 koran	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Koran	19.499.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	110.000.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	123.892.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 jenis	30.000.000	
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35 Jenis	26.240.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	150.000.000	
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 kali							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	1 paket	20.000.000	
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%	659.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	12 bulan	700.000.000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Kali	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 kali	50.000.000	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	30.000.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	589.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%	179.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	12 bulan	190.000.000	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 roda empat dan 7 roda 2	96.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	43.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	50.000.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Jenis	39.620.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	40.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				3.986.046.000					4.335.000.000	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	102.500.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	130.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	102.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 kali	130.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelurahan	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kelurahan	-	
29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali & 540 orang	102.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kali 200 orang	130.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.171.246.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1.057.205.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	1.171.246.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 Kali	1.057.205.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 kali		
31	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 Parpol 8 rekomendasi	1.155.746.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 bantuan	957.205.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	16 Partai Politik, 12 kali dan 150 orang	15.500.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 kali	100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang di bina	100%	105.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang di bina	100%	150.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	105.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12 dokumen	150.000.000	
33	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	574 ormas	105.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	574 Ormas	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	412.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	467.795.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	412.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 dokumen	467.795.000	
34	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	12 Dokumen	44.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	12 dokumen	200.000.000	
35	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	20 orang 69 Orang	110.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	12 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang dan 12 kali	258.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	267.795.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.195.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	2.530.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	2.195.300.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.530.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	30 perusahaan	34.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan / Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12 dokumen	30.000.000	
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan Jumlah Pengamanan MTQ Jumlah Peserta Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah rencana Aksi Terpadu	15 rencana aksi, 12 kali, 2 Hari Besar keagamaan dan 88 Desa	2.161.300.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rencana Aksi Terpadu, Jumlah Rapat Koordinasi, Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan dan Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades	1 kali 55 orang 12 Kali 15 Rencana Aksi 1 kali 88 Desa	2.500.000.000	
J U M L A H					7.056.985.970,00					7.563.900.484	

TABEL 2.1.b
Realisasi Capaian Kinerja (SIEVK) Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 - 6 + 12		14 - 13/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesorvasian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	13 dokumen	43.004.700,00	100	18.385.000,00	100	43.254.700,00	32,5	15.004.700,00	22,5	6.000.000,00	27,5	16.200.000,00	18	5.000.000,00	100	43.004.700,00	200	61.389.700,00	300	1.227.794.000,00	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesorvasian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	3 dokumen	11.003.500,00	100	6.785.000,00	100	11.283.500,00	35	9.503.500,00	25	1.500.000,00	15	0	25	-	100	11.003.500,00	200	17.788.500,00	4000	355.770.000,00	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kesorvasian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.500.600,00	100	3.000.000,00	100	3.500.600,00	35	2.000.600,00	15	0	35	1.500.000,00	15	-	100	3.500.600,00	200	7.200.600,00	4000	146.012.000,00	
3		Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Persentase kesorvasian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	1 dokumen	3.500.600,00	100	3.000.000,00	100	3.500.600,00	35	2.000.600,00	15	0	35	1.500.000,00	15	-	100	3.500.600,00	200	7.200.600,00	4000	146.012.000,00	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesorvasian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	6 dokumen	25.000.000,00	100	4.000.000,00	100	25.000.000,00	25	1.500.000,00	35	4.500.000,00	25	13.200.000,00	15	5.800.000,00	100	25.000.000,00	200	29.000.000,00	4000	500.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesorvasian Pelaksanaan Kinerja dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah		2.700.664.020,00	100	1.591.490.045,00	100	2.700.664.020,00	25	363.694.709,00	27,5	402.521.694,00	25	602.171.666,00	23	773.569.951,00	100	2.221.950.020,00	200	3.813.440.065,00	300	76.268.961.300,00	
5		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesorvasian Pelaksanaan Kinerja dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah	15 org	2.681.212.320,00	100	1.576.490.045,00	100	2.681.212.320,00	25	389.194.709,00	30	477.592.294,00	25	597.269.766,00	20	768.249.551,00	100	2.202.306.320,00	200	3.778.796.315,00	4000	75.575.927.200,00	
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Kesorvasian Pelaksanaan Kinerja dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dak	2.320.400,00	100	5.000.000,00	100	2.320.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2.320.400,00	0	2.320.400,00	100	7.320.400,00	2000	146.408.000,00	
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD	Persentase Kesorvasian Pelaksanaan Kinerja dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah	12 dak	17.331.300,00	100	10.000.000,00	100	17.331.300,00	25	4.500.000,00	25	4.929.400,00	25	4.901.900,00	25	3.000.000,00	100	17.331.300,00	200	27.331.300,00	4000	546.626.000,00	

	Program Urusan Kesehatan Bangsa dan Politik		6.067.246.000,00	100	4.691.225.000,00	100	4.367.246.000,00	23	483.690.400,00	100	2.443.611.975,00	30	920.397.425,00	21	#####	100	5.763.835.650,00	200	10.455.060.650,00	4000	209.101.213.000,00
22	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam bermasyarakat	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	310.000.000,00	100	31.390.000,00	100	310.000.000,00	15	-	15	-	35	96.194.650,00	35	211.895.000,00	100	308.089.650,00	200	339.479.650,00	4000	6.789.593.000,00
23		Perencanaan Kebijakan Teknikir dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	310.000.000,00	100	31.390.000,00	100	310.000.000,00	15	-	15	-	35	96.194.650,00	35	211.895.000,00	100	308.089.650,00	200	339.479.650,00	4000	6.789.593.000,00
24		Polakrean Koordinari di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bola Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunqqalika dan Sejarah Kebangsaan	310.000.000,00	100	31.390.000,00	100	310.000.000,00	15	0	15	0	35	96.194.650,00	35	211.895.000,00	100	308.089.650,00	200	339.479.650,00	4000	6.789.593.000,00
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Penge	1.242.451.000,00	100	1.122.446.000,00	100	1.242.451.000,00	20	9.971.000,00	30	1.068.239.700,00	30	156.454.300,00	20	-	100	1.242.451.000,00	200	2.364.897.000,00	300	47.297.940.000,00
	Meningkatkan partisipasi dalam mendukung prasarana demokrasi sebelum optimal	Perencanaan Kebijakan Teknikir Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolaborasi Pemerintahan, Perusukilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pementapan Situasi Politik	1.242.451.000,00	100	1.122.446.000,00	100	1.242.451.000,00	20	9.971.000,00	30	1.068.239.700,00	30	156.454.300,00	20	-	100	1.242.451.000,00	200	2.364.897.000,00	300	47.297.940.000,00
26		Polakrean Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolaborasi Pemerintahan, Perusukilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pementapan Situasi Pali	1.207.451.000,00	100	1.110.046.000,00	100	1.207.451.000,00	15	0	35	1.059.574.700,00	35	147.544.300,00	15	332.000,00	100	1.207.451.000,00	200	2.317.497.000,00	4000	46.349.840.000,00
29		Polakrean Koordinari Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolaborasi Pemerintahan, Perusukilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pementapan Situasi Pal	35.000.000,00	100	12.400.000,00	100	35.000.000,00	25	9.971.000,00	25	8.665.000,00	25	8.910.000,00	25	7.454.000,00	100	35.000.000,00	200	47.400.000,00	4000	946.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	500.000.000,00	100	176.500.000,00	100	200.000.000,00	30	4.040.000,00	30	18.814.150,00	30	152.864.500,00	10	24.281.350,00	100	200.000.000,00	200	376.500.000,00	300	7.530.000.000,00
	Meningkatkan partisipasi dalam mendukung prasarana demokrasi sebelum optimal	Perencanaan Kebijakan Teknikir dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Komasyarakatan	500.000.000,00	100	176.500.000,00	100	200.000.000,00	30	4.040.000,00	30	18.814.150,00	30	152.864.500,00	10	24.281.350,00	100	200.000.000,00	200	376.500.000,00	300	7.530.000.000,00
30		Polakrean Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkato Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Aning di Daerah	500.000.000,00	100	176.500.000,00	100	200.000.000,00	30	4.040.000,00	30	18.814.150,00	30	152.864.500,00	10	24.281.350,00	100	200.000.000,00	200	376.500.000,00	4000	7.530.000.000,00

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase patneri konflik tidak menjadi konflik linier upayakan kabangsaan	350.000.000,00	100	238.000.000,00	100	250.000.000,00	25	27.818.150,00	30	61.202.550,00	30	118.640.000,00	15	46.946.433,33	100	348.500.000,00	200	586.500.000,00	300	11.730.000.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknikir Dan Pementapan Palekranees Bidang Ketekeaan Eknami, Sural Dan Budeya	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknikir Dan Pementapan Palekranees Bidang Ketekeaan Eknami, Sural Dan Budeya	350.000.000,00	100	238.000.000,00	100	250.000.000,00	25	27.818.150,00	30	61.202.550,00	30	118.640.000,00	15	46.946.433,33	100	348.500.000,00	200	586.500.000,00	300	11.730.000.000,00	
33		Pelaksanaan Kaardinari di Bidang Ketekeaan Eknami, Sural, Budeya dan Farilitari Pancegahan Penyelidikan Markatika, Farilitari Kerukunan Umot Barogama dan Ponghayat Koparceyasan di Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Palekranees Kaardinari di Bidang Farilitari Kerukunan Umot Barogama dan Ponghayat Koparceyasan di Daerah	250 orang dan 12 kali	350.000.000,00	100	238.000.000,00	100	250.000.000,00	25	27.818.150,00	30	61.202.550,00	30	118.640.000,00	15	46.946.433,33	100	348.500.000,00	200	586.500.000,00	4000	11.730.000.000,00
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idologi Negara nilai nilai budeyalokal dalam kehidupan bermasyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase patneri konflik tidak menjadi konflik linier upayakan Marinsal	3.664.795.000,00	100	3.122.449.000,00	100	2.364.795.000,00	25	441.851.250,00	25	1.295.355.575,00	25	396.243.975,00	25	765.672.100,00	100	3.664.795.000,00	200	6.787.684.000,00	300	135.753.600.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknikir Dan Palekranees Pementapan Kowarpodees Marinsal dan Penecegahan Konflik Sural	Jumlah Dokumen / Laporan Perumusan Kebijakan Teknikir Dan Palekranees Pementapan Kowarpodees Marinsal dan Penecegahan Konflik Sural	3.664.795.000,00	100	3.122.449.000,00	100	2.364.795.000,00	25	441.851.250,00	25	1.295.355.575,00	25	396.243.975,00	25	765.672.100,00	100	3.664.795.000,00	200	6.787.684.000,00	300	135.753.600.000,00	
34		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kowarpodees Dini, Karjarama Intalijen, Pomentovan Orang Aring, Tonaga Karja Aring dan Lomba Aring, Kowarpodees Paribetaran Antar Negara, Farilitari Kolombogean Bidang Kowarpodees, serta Penecegahan Konflik	Jumlah Laporan / Dokumen Pomentovan Orang Aring, Tonaga Karja Aring dan Lomba Aring	30 perurahaan	38.000.000,00	100	27.200.000,00	100	38.000.000,00	25	9.493.250,00	25	9.013.375,00	25	9.013.375,00	25	7.400.000,00	100	38.000.000,00	200	62.200.000,00	4000	1.244.000.000,00
35		Pelaksanaan Kaardinari di Bidang Kowarpodees Dini, Karjarama Intalijen, Pomentovan Orang Aring, Tonaga Karja Aring dan Lomba Aring, Kowarpodees Paribetaran Antar Negara, Farilitari Kolombogean Bidang Kowarpodees, serta Penecegahan Konflik	Jumlah ronsana Akzi Terpadu, Jumlah Rapat Kaardinari, Jumlah Pongamanan Hari-Hari Barar koagamaan dan Jumlah Darayang Mendadakan Pillekdar	15 ronsana akzi, 12 kali, 2 Hari Barar koagamaan dan 88 Dara	3.629.795.000,00	100	3.095.689.000,00	100	2.329.795.000,00	25	432.358.000,00	25	1.286.342.200,00	25	387.230.600,00	25	1.523.844.200,00	100	3.629.795.000,00	200	6.725.404.000,00	4000	134.509.680.000,00
TA					10.121.633.528,00		7.546.749.295,00		6.383.037.020,00	23,911	1.128.641.637,00	63,9	3.278.003.247,00	26,6	1.806.793.303,00	23	2.225.561.375,33	100,00	6.439.039.562,33	100	16.953.139.424,00	100	337.062.796.400,00

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Ronsa berikutnya*):

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor Tahun 20 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, target yang harus di upayakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang meliputi 4 (Empat) Indikator sebagai berikut :

1. TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanthapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :
 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2. TINGKAT BINA DEMOKRATISASI

- a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

4. INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITA

TABEL 2.2.a
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Tabel 2.2.a.1

Kinerja Pelayanan Nomenklatur Kantor KESBANGPOL Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun			
		Kondisi Awal (2018)	2019	2020	2021
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,2	72,2 point (N.a)	72,2 point (N.a)	72,2 point (N.a)
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	0%	100%	100%	100%
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes	80,65%	82,6%	79%	80%
4	Persentase Ormas yang aktif kategori Aktif	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.a.2

Kinerja Pelayanan Nomenklatur Badan KESBANGPOL Tahun 2022-203

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun	
		Kondisi Awal (2021)	2023
1	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%
2	Tingkat Bina Demokratisasi	0%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa

permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Permasalahan dalam Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 3) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat;
2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal;
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
4. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi;
5. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati , dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnya tuntutan ganti rugi;
6. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah;
7. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertikal tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang

terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan;

8. Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%;
9. Kondusifitas Daerah tetap terjaga Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari – hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis;
10. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP
11. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
12. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

13. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
14. Gangguan PEKAT masih tinggi
15. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
16. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
17. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
18. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
19. Peran ormas di masyarakat belum optimal
20. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
21. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
22. Belum terbentuknya sistem informasi ormas
23. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
24. Sinergitas antar lembaga masih kurang
25. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, dan parpol
26. Belum optimalnya pendidikan politik
27. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Perencanaan anggaran awal tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2023 dengan rencana anggaran awal dan hasil pemutakhiran yang dilaksanakan prosesnya dalam awal tahun 2023. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 terhadap Rancangan Awal RKPD pada pendanaan APBD Sebesar Rp. **9,139,557,708.00** dan Hasil Analisis Kebutuhan **Rp. 18,878,769,988.00** dan dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut :

Tabel 2.3
RANCANGAN AWAL RKPD DAN HASIL ANALIS KEBUTUHAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	310.000.000	308089650	99,38	191.035.000
				Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	310.000.000	308089650	99,38	191.035.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	310.000.000	308089650	99,38	191.035.000

program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	500.000.000	499743950	99,95	256.050
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	500.000.000	499743950	99,95	256.050
Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500.000.000	499743950	99,95	256.050
program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	350.000.000	348.500.000	99,57	1.500.000
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	350.000.000	348.500.000	99,57	1.500.000
Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	348.500.000	99,57	1.500.000
program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	3.664.795.000	3.654.308.830	99,08	10.486.710
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	3.664.795.000	3.654.308.830	99,08	10.486.710
Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35.000.000	34.450.000	98,43	550.000
Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.629.795.000	3.619.858.290	99,73	9.936.710

2	Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	100%	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika budaya	1.242.451.000	1.241.794.662	99,97	656.338
				Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.242.451.000	1.241.794.662	99,97	656.338
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.207.451.000	1.206.794.662	99,95	656.338
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35.000.000	35.000.000	100	0
TOTAL				6.067.246.000,00	6.042.370.291,00	99,73	24.875.709,00	

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG APBD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
8.01.03.2.01.03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	96.359.480.225,00
	KPU	92.636.749.725,00
	BAWASLU	1.514.780.000,00
	BAWASLU	1.280.720.000,00
	DEMOKRAT	59.743.500,00
	GERINDRA	140.329.500,00
	PAN	79.434.000,00
	GOLKAR	136.900.000,00
	PDI P	199.540.500,00

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
	PKB	84.574.500,00
	PKS	93.622.500,00
	PPP	133.086.000,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	540.220.000,00
	BNNK	220.220.000,00
	FKUB	320.000.000,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.480.032.000,00
	KODIM 0610	2.754.032.000,00
	KEJAKSAAN	726.000.000,00
JUMLAH		100.379.732.225,00

Tabel 2.5
Berita Acara Hasil Forum SKPD Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dari Ketua Komisi 1- ASEP KURNIA., S.H.,MH.
2. Pemaparan Materi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diwakili Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik - H. ROSADI., S.Sos., M.Si
3. Pemaparan Materi dari Kabid Penelitian dan pengembangan / Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang - RISYANA, S.STP
4. Pemaparan Materi dari Bappppeda Kabupaten Sumedang - CUCU., SE
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh fasilitator sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 1 Maret 2022

J a m : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022

MENYEPAKATI

- KESATU :** Menyepakati Program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KEDUA :** Menyepakati Rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini..
- KETIGA :** Menyepakati Daftar usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEEMPAT :** Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023




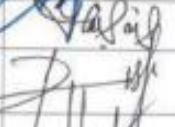
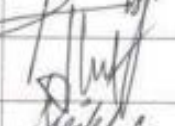



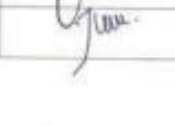



Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, 1 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
 NIP. 19660228 199901 1 001

Menyetujui,
 Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	ASEP KURNIA, S.H., MH	DPRD		
2.	Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si	BAKESBANGPOL		
3.	H. ROSADI, S.Sos., M.Si	BAKESBANGPOL	<i>Panbau dan</i>	
4.	DEDI SUPARMAN, S.H	BAKESBANGPOL	<i>Bakysbangpol</i>	
5.	YUYUN YUNINGSIH, S.Sos	BAKESBANGPOL	<i>Perwakilan Kecamatan</i>	
6.	RISYANA, S.STP	UNSUR BAPPPEDA	<i>Bapppeda</i>	
7.	CUCU, SE	UNSUR BAPPPEDA	<i>Mekarjaya</i>	
8.	AI ROSIDAH, SE	UNSUR BAPPPEDA		
9.	AMAR	FDM		
10.	ANDRY SUSANDERA	UNSUR PERANGKAT DAERAH	<i>Bakesbangpol</i>	
11.	CHANDRA WIGUNA, S.Kom	UNSUR PERANGKAT DAERAH	<i>Bakysbangpol</i>	
12.	ASEP DANI	UNSUR MASYARAKAT		

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SUMEDANG
(TATAP MUKA)**




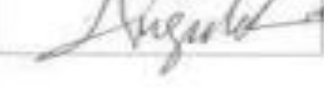
Kabupaten : Sumedang
Tanggal : 01 Maret 2022
Tempat : Aula Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1	Imar .A.	FDM.	082116850733	
2	Aceng Rahman	Delegasi	08275996925	
3	Gustaf R	FDM	081394574619	
4	Risjana	Keaspiran	081521705900	
5	Ari	Bapp	682.126705932	
6	EROS	Bapp	08246745700	
7	Cuw	-	085314851444	
8	A. Jalani	Kedmi 0610/SW	085314469077	
9	Dede M.	FDM	087818513714	
10	XUXUN. XUNINGOH		081222536917	
11				
12	Andry Susandeka	Kesbangpol	089656822142	
13	Sony Harsandy	Kesbangpol	085723464814	
14	Dena Herdiyana	Kesbangpol	085721873626	

15	Wiwik W	Kesbangpol		
16	Adimurcul N	Kesbangpol		
17	Anang Mulyad	Kesbangpol		
18	Subhan Sayid	Kesbangpol		
19	F erdi . F			
20	Charika Wigra	Kesbangpol		
21	Eli A.	-		
22	Rosari	-		
23	Revi Indah S.	-		
24	Heri. An	-		
25	E. Kernal	-		

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN
KESBANG POL
Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

**DAFTAR NARASUMBER DAN DELEGASI FORUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. SUMEDANG**

No	Nama	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.			
2.	Rufana	BAPERA	
3.	Amaria	FDPA	
4.	Uuw	Bopppepa	
5.	At Rosidah	PO appppeda	



 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMEDANG
 Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
 NIP. 19660228 199901 1 001

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sumedang**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Wilayah Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
B 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.139.557.708,00			
B 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 Persen	100 Persen	4.114.557.708,00			
B 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	104.000.000,00			
B 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	63.000.000,00			
B 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	100 Persen	4.000.000,00			
B 01 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	100 Persen	4.000.000,00			
B 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	100 Persen	4.000.000,00			
B 01 01 2,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	100 Persen	4.000.000,00			
B 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00			Fixed Cost
B 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	2.772.764.988,00			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Wilayah Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Kart
				Tahun 2023	Tahun 2024	APSD Kabupaten	APSD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	2.752.764.988,00			
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00			
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00			
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00			
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00			
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	100 Persen	327.792.720,00			
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	-			
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	7.000.000,00			
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00			
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00			
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00			
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen	140.000.000,00			
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Persen	100 Persen	30.792.720,00			
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Persen	100 Persen				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Wilayah Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00			
B 01 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	20.000.000			
B 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	20.000.000			
B 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	100 Persen	670.000.000,00			
B 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000			
B 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	30.000.000			
B 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	575.000.000			
B 01 01 2,08 05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Taklim Aparatur)	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	15.000.000			Fixed Cost
B 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	100 Persen	195.000.000,00			
B 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Persen	100 Persen	120.000.000			
B 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Persen	100 Persen	15.000.000			
B 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	100 Persen	60.000.000			
B 03 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	100 Persen				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5.025.000.000			
B 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	230.000.000,00			
B 01 02 2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	230.000.000,00			
B 01 02 2,01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 persen	100 persen	-			
B 01 02 2,01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 persen	100 persen	230.000.000,00			
	GNRM					50.000.000,00			
	Bintek Wasbang					50.000.000,00			
	Sumpah Pemuda					50.000.000,00			
	Kemah Pembauran					80.000.000,00			
B 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100 Persen	100 Persen	550.000.000,00			
B 01 03 2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100 Persen	100 Persen	550.000.000,00			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket										
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
8	01	03	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
					Penelitian Bantuan Keuangan Parpol														
					Bantuan Keuangan Parpol						100.000.000,00								
					Hibah KPU														
8	01	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
					Sosialisasi pemilih pemula, tokoh Agama dan Disabilitas														
					Kemitraan Parpol														Fixed Cost
					Jambore Parpol														
											300.000.000,00								
											50.000.000,00								
											100.000.000,00								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Kert
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang aktif	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00			
B 01 04 2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas yang aktif	100 Persen	100 Persen	250.000.000,00			
B 01 04 2,01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 persen	100 persen	250.000.000,00			
	Pengawasan Ormas					50.000.000,00			
	Validasi Ormas					50.000.000,00			
	Pelaporan Ormas					50.000.000,00			
	Jambore Ormas					100.000.000,00			
B 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 Persen	100 Persen	275.000.000,00			
B 01 05 2,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 Persen	100 Persen	275.000.000,00			
B 01 05 2,01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat		Terusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 persen	100 persen	125.000.000,00			
	FKUB					125.000.000,00			
B 01 05 2,01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 persen	100 persen				Fixed Cost

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	01 05 2,01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.						
				Tertelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	100 persen	100 persen	150.000.000,00		
							150.000.000,00		
							150.000.000,00		
B	01 06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 Persen	100 Persen	3.720.000.000,00		
B	01 06 2,01		Penusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 Persen	100 Persen	3.720.000.000,00		
B	01 06 2,01 03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 persen	100 persen	35.000.000,00		
B	01 06 2,01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tertelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 persen	100 persen	3.685.000.000,00		
			Fasilitas dan Operasional Pemilu 2024 (Pengaman tertutup)				900.000.000,00		Fixed Cost
			Penanganan Konflik Sosial				100.000.000,00		

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Ket
				Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN(DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)					1.500.000.000,00			Fixed Cost
	Penguatan Forkopimda					200.000.000,00			
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan dul fitri					500.000.000,00			Fixed Cost
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru					385.000.000,00			
	Bentuk intelijen					100.000.000,00			
JUMLAH						9.199.557.708,00			

Bandung, 11 Maret 2022
 Kepala Badan Kesbang dan Politik
 Kabupaten Sumedang

Dr. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
 Pejabat / IV b
 NIP. 19660228 199901 1 001

**Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
	<i>NIHIL</i>			

Sumedang, Maret 2022



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si

Pembina Tk. / IV.b

NIP. 19660228 199901 1 001

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023 Merupakan Rencana Kerja penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Karena keterkaitan antara Program dan Kegiatan yang berdampak pada IKU Bakesbangpol yaitu :

1. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif yang ditunjang dalam Empat (4) Program dan Empat (4) Kegiatan; dan
2. Tingkat Bina Demokratisasi yang ditunjang dalam satu (1) Program dan satu (1) kegiatan.

yang mana akan bersinergitas kepada kinerja pelayanan baik pada masyarakat di Kabupaten Sumedang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai implementasi Nawa Cita, maka dalam aspek politik dan demokrasi terus dimantapkan dan ditingkatkan implementasi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penguatan lembaga kepresidenan, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, penyempurnaan peraturan perundangan kepemiluan, parpol dan ormas, serta mendorong peningkatan peran kelompok marginal termasuk peran perempuan dalam politik

Arah kebijakan dan strategi pada RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat, dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah penerapan kebijakan *affirmative action* kepada kelompok marginal; peningkatan kapasitas kelompok perempuan; penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya; pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marginal; pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumedang Sebagai Berikut:

- a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya :
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

- Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	12 bulan	12 dokumen	2,752,764,988	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2,752,764,988
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	1 laporan	12 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	0
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	12 laporan	12 dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	35,000,000
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								110,000,000					115,000,000
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	35 stel	2 laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	100,000,000
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 Dokumen	2 laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	15,000,000
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								690,000,000					740,000,000
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 paket	12 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	0
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 paket	12 laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	20,000,000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 paket	12 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	160,000,000
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 paket	12 laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	60,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	20,000,000
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 laporan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	260,000,000
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	60,000,000
8 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	160,000,000
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,856,000,000					3,000,000,000
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	15 unit	1 dokumen	1,856,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	1,900,000,000
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	30 unit	1 dokumen	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	1,100,000,000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								780,000,000					810,000,000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	70,000,000
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	80,000,000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	660,000,000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								820,000,000					900,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	10 Unit	3 dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	310,000,000
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	20 Unit	3 dokumen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	80,000,000
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 unit	3 dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	310,000,000
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 unit	3 dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	200,000,000
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								1,590,000,000					1,600,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								1,590,000,000					1,600,000,000
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 persen	1 Kelurahan	1 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 persen	0
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	150 Orang	1 laporan	1,590,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 persen	1,600,000,000
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik								1,347,005,000					1,410,000,000
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,347,005,000					1,410,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Pendidikan dan Fartisipasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	50 Orang	1 laporan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Pendidikan dan Fartisipasi Politik	100 persen	550,000,000
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Pendidikan dan Fartisipasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	150 Orang	1 laporan	847,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Pendidikan dan Fartisipasi Politik	100 persen	860,000,000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								850,000,000					900,000,000
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								850,000,000					900,000,000
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	523 Orang	1 laporan	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ormas yang aktif	100 persen	900,000,000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								625,000,000					700,000,000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								625,000,000					700,000,000
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	1 Dokumen	1 laporan	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen	150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		100 persen	0 Orang	1 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen	0
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	55 Orang	1 laporan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen	550,000,000
8 01 06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					6,300,000,000				6,620,000,000		
8 01 06 2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					6,300,000,000				6,620,000,000		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	15 Orang	1 laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 persen	120,000,000
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	500 Orang	1 laporan	6,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 persen	6,500,000,000
TOTAL									18,878,769,988				19,721,764,988	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Sesuai tugas Pokok dan fungsi serta melihat dan mencermati latar belakang dan fenomena- fenomena saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Tujuan sebagai berikut :

“TERCIPTANYA KABUPATEN SUMEDANG YANG KONDUSIF DAN DEMOKRATIS”.

Tujuan diatas, secara umum mengandung makna terciptanya Masyarakat Sumedang yang Kondusif dan Demokratis guna mendukung lancarnya pelaksanaan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan makna secara harfiah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi

Tujuan penetapan di maksud adalah guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sebagai cermin apa yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
- (2) Sebagai cermin dalam memberikan arah dan fokus strategis yang jelas terhadap resfek kerja dan unjuk kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap layanan masyarakat Kabupaten Sumedang.
- (3) Sebagai itikad dalam optimalisasi potensi yang ada terhadap kinerja masa depan.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan, *sebagai berikut;*

- 1) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
- 2) Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
- 4) Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan
- 5) Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
- 6) Membangun hubungan yang harmonis dan manusiawi di antara pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan berakhlak mulia.

3.2 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 4) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Permasalahan dalam Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 6) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.2.a di bawah ini :

Tabel 3.2
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 3. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 4. Gangguan PEKAT masih tinggi 5. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada 6. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 7. Status Covid 19 di Kabupaten Sumedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat • pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasibelum optimal • Penyederhanaan birokrasi dan transformasi digital
2	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran ormas di masyarakat belum optimal 2. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM 3. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 	
3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi uu tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politik 4. Belum optimalnya tim pemantau perkembangan politik di daerah kabupaten sumedang 5. Status kebangsaan dan politik di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional (meliputi Pemilu, Pilkada serentak tahun 2024) 6. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social 7. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 8. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasibelum optimal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	2,752,764,988	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 bulan	2,752,764,988	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110,000,000							115,000,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				35 stel	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		35 stel	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						690,000,000							740,000,000	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 paket	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 laporan	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 dokumen	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 dokumen	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,856,000,000						3,000,000,000		
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 unit	1,856,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	15 unit	1,900,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 unit	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	30 unit	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						780,000,000						810,000,000		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 laporan	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 laporan	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	650,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 laporan	660,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						820,000,000							900,000,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		10 Unit	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	70,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		20 Unit	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 unit	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 unit	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	persen		persen	100 persen	1,590,000,000						100 persen	1,600,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1,590,000,000							1,600,000,000	
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Kelurah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Kelurah	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	1,590,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		150 Orang	1,600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	persen		persen	100 persen	1,347,005,000						100 persen	1,410,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1,347,005,000							1,410,000,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	500,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PEN DAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		50 Orang	550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	847,005,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		150 Orang	860,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	persen		persen	100 persen	850,000,000						100 persen	900,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						850,000,000							900,000,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				523 Orang	850,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		523 Orang	900,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	persen		persen	100 persen	625,000,000						100 persen	700,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						625,000,000							700,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	125,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				55 Orang	500,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	55 Orang	550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	persen		persen	100 persen	6,300,000,000					100 persen	6,620,000,000		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						6,300,000,000						6,620,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		15 Orang	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500 Orang	6,200,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		500 Orang	6,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							18,878,769,988							19,721,764,988	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan dukungan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam kaitan itu, seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan dukungan pihak-pihak yang terkait, perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2023 agar mampu memberikan output dan hasil sesuai dengan harapan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Guna pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja ini, seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Demikian, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2023 agar yang berkepentingan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sumedang, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu & Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari
Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 tahun 2019. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang selama tahun 2023.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Sumedang, D e s e m b e r 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

LAMPIRAN